

# FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENUMPUKAN PENYERAPAN ANGGARAN PADA TRIWULAN IV DI KOTA CIMAHI

**Binti Zulaikah<sup>1</sup>, Dian Imanina Burhany<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012

E-mail : [binti.zulakah.amp15@polban.ac.id](mailto:binti.zulakah.amp15@polban.ac.id)

<sup>2</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012

E-mail : [dian.imanina@polban.ac.id](mailto:dian.imanina@polban.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh faktor-faktor yang terdiri atas perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan pengadaan barang/jasa terhadap penumpukan penyerapan anggaran Triwulan IV di Kota Cimahi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data penelitian adalah data primer yang dikumpulkan menggunakan instrumen kuesioner yang dibagikan kepada 27 Perangkat Daerah yang ada di Kota Cimahi sebagai unit analisis. Masing-masing Perangkat Daerah diberikan 3 kuesioner untuk 3 orang responden yang berhubungan dengan proses penyerapan anggaran yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Bendahara Pengeluaran. Data dianalisis secara statistik menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS *for Windows* versi 23.0. Sebelum dianalisis, dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian serta pengujian asumsi klasik. Pengujian hipotesis menggunakan Uji t untuk pengaruh parsial dan Uji F untuk pengaruh simultan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor perencanaan, pelaksanaan, sumber daya manusia, dan pengadaan barang/jasa berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV.

### **Kata kunci**

*Penyerapan, Anggaran, Perencanaan, Pelaksanaan, SDM, Pengadaan.*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Masalah utama dalam hal anggaran di pemerintahan adalah ketidaksesuaian penyerapan anggaran dengan targetnya. Permasalahan klasik yang kerap terjadi adalah kondisi di mana penyerapan anggaran rendah di awal tahun (triwulan awal) dan melonjak drastis di akhir tahun (Triwulan IV). Idealnya, suatu anggaran dapat terserap secara merata sebesar 25% per triwulan atau secara akumulatif sebesar 25% pada Triwulan I, 50% pada Triwulan II, 75% pada Triwulan III, dan 100% pada Triwulan IV atau triwulan akhir [1]. Dengan kata lain, penyerapan anggaran yang baik dilakukan

secara maksimal pada triwulan-triwulan awal sehingga di triwulan akhir pemerintah tidak kewalahan untuk melakukan penyerapan anggaran. Namun realita saat ini banyak sekali terjadi fenomena tidak terserapnya anggaran secara optimal sesuai batas ideal penyerapan anggaran per triwulan. Penyerapan anggaran yang terjadi cenderung rendah di triwulan awal dan meningkat di triwulan akhir [2].

Fenomena ini juga terjadi pada Pemerintah Kota Cimahi dalam penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD-nya, sebagaimana terlihat pada data Realisasi Anggaran tahun 2018 yang disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Data Realisasi Anggaran Tahun 2018

Triwulan I	Januari	Realisasi	2.50%	11.6%
		Akumulasi	2.50%	
	Februari	Realisasi	3.83%	
		Akumulasi	6.33%	
	Maret	Realisasi	5.30%	
Akumulasi		11.63%		
Triwulan II	April	Realisasi	6.24%	19.6%
		Akumulasi	17.87%	
	Mei	Realisasi	5.39%	
		Akumulasi	23.26%	
	Juni	Realisasi	8.01%	
Akumulasi		31.27%		
Triwulan III	Juli	Realisasi	8.51%	20.8%
		Akumulasi	39.78%	
	Agustus	Realisasi	5.42%	
		Akumulasi	45.20%	
	September	Realisasi	6.90%	
Akumulasi		52.10%		
Triwulan IV	Oktober	Realisasi	6.01%	33.5%
		Akumulasi	58.11%	
	November	Realisasi	4.24%	
		Akumulasi	62.35%	
	Desember	Realisasi	23.31%	
Akumulasi		85.66%		

Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa pada Triwulan IV memang terjadi penumpukan penyerapan anggaran yang ditunjukkan oleh besaran realisasi yang cenderung lebih besar dibandingkan triwulan lainnya. Dapat diamati pula bahwa penyerapan anggaran tidak merata pada keempat triwulan. Pada triwulan-triwulan awal, penyerapan yang terjadi sangat rendah. Penyerapan pada Triwulan I hanya sebesar 11,63%, pada Triwulan II sebesar 19,64%, pada Triwulan III sebesar 23,83%, dan pada Triwulan IV sebesar 33,56%. Tidak hanya pada tahun 2018 saja, pada tahun-tahun sebelumnya pola penyerapan anggaran Pemerintah Kota Cimahi menunjukkan penumpukan yang terjadi pada Triwulan IV. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, pada tahun 2017 penyerapan anggaran pada Triwulan IV adalah sebesar 34,07% yang lebih besar dibandingkan penyerapan pada triwulan-triwulan sebelumnya. Jumlah penyerapan pada Triwulan IV ini sudah sedikit menurun pada tahun 2018, namun tetap terjadi penumpukan dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya.

Dengan terjadinya hal ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat di Kota Cimahi belum dapat menikmati program pelayanan masyarakat yang seharusnya diberikan oleh pemerintah, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan bentuk pelayanan lainnya secara maksimal. Pelayanan tersebut telat diterima karena

pelaksanaannya mundur ke akhir tahun. Jika pelaksanaan kegiatan yang tergambar dari serapan anggaran mundur ke akhir tahun padahal seharusnya bisa dilaksanakan lebih awal, maka pihak yang dirugikan sebenarnya adalah masyarakat banyak, karena tertunda menerima manfaat [1].

Banyak faktor yang mempengaruhi penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV ini sebagaimana telah diteliti sebelumnya. Faktor-faktor utamanya adalah perencanaan, pelaksanaan, sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa, telah diteliti oleh Sanjaya, 2018 [3]; Negara, Handajani, dan Effendy, 2018 [4]; Sudarwati, Karamoy, dan Pontoh, 2017 [2]; Nugroho dan Alfarisi, 2017 [5]; Malahayati, Islahuddin, dan Basri, 2017 [6]; Sudasri, 2016 [7]; Zarinah, Darwanis, dan Abdullah, 2016 [8]; Nugroho, 2013 [9]; Herriyanto, 2012 [10]; Salamah, 2018 [11]; Zakiati, 2016 [12]; Krisnawati, Sudana, dan Wirana, 2017 [13]; . Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran memiliki dampak terhadap peningkatan dan percepatan proses penyerapan anggaran pemerintah sehingga penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun dapat dihindari [6]. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun [8]. Sudarwati, Karamoy, dan Pontoh [2] mengidentifikasi empat faktor yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, dan sumber daya manusia sebagai faktor-faktor yang menyebabkan penumpukan realisasi anggaran belanja di akhir tahun. Penelitian ini dilakukan di Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Manado dengan metode penelitian kualitatif.

Dengan adanya masalah penyerapan anggaran di Kota Cimahi, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali apakah faktor-faktor perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, sumber daya manusia, dan pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV di Kota Cimahi. Belum ada penelitian sebelumnya yang dilakukan di Kota Cimahi dengan menggunakan variabel ini.

## 1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, sumber daya manusia, dan pengadaan barang/jasa secara parsial maupun simultan terhadap penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV di Kota Cimahi.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah adanya masukan atau rekomendasi kepada Pemerintah Kota Cimahi mengenai faktor-faktor yang dapat mengatasi dan meminimalisir penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Anggaran dan Penganggaran Sektor Publik

Anggaran adalah suatu dokumen yang memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan [4]. Mardiasmo [14] mendefinisikan anggaran sebagai suatu pernyataan yang merincikan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai oleh suatu entitas dalam periode tertentu dan diukur dengan ukuran finansial.

Adapun penganggaran merupakan mekanisme dan prosedur persiapan/perencanaan, implementasi dan monitoring anggaran. Penganggaran sektor publik merupakan hal yang krusial dan penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Proses penganggaran dilaksanakan dalam satu tahun dari proses persiapan, persetujuan, pelaksanaan, kontrol, evaluasi dan monitoring [10].

### 2.2 Penyerapan Anggaran

Terdapat beberapa tahapan di dalam siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran [4]. Tahapan penyerapan anggaran dimulai ketika Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR. Di tingkat daerah, di

mana penetapan dan pengesahan anggaran dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, tahapan penyerapan dimulai ketika Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD disahkan oleh DPRD.

Menurut Mardiasmo [14], kinerja manajer publik akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, berapa besar yang berhasil dicapai atau diserap. Penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis simpangan kinerja aktual yaitu serapan dengan yang dianggarkan. Semakin tinggi penyerapan anggaran, maka semakin baik kinerja manajer publik tersebut. Suatu Pemda (Pemerintah Daerah) seharusnya dapat melakukan penyerapan anggaran secara ideal yaitu penyerapan anggaran yang dilakukan secara merata dari Triwulan I hingga Triwulan IV yang masing-masing triwulannya terserap sebesar 25% dari jumlah anggaran yang ada. [1]

Penyerapan anggaran yang cenderung rendah di awal tahun berdampak terhadap terjadinya penumpukan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun. Hal tersebut terjadi akibat pelaksanaan kegiatan yang belum berjalan optimal. Pelaksanaan kegiatan yang tidak berjalan optimal tersebut menyebabkan inkonsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini kurang baik, karena saat ini penyerapan anggaran menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja suatu perangkat daerah. Karena kejadian ini sudah sering terjadi bahkan berulang setiap tahunnya, bisa dikatakan sebagai budaya organisasi karena kejadiannya terus berulang [4].

### 2.3 Perencanaan Anggaran dan Penumpukan Penyerapan Anggaran

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional [15], perencanaan adalah sebuah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat atau sesuai, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya. Haryanto [16] menjelaskan bahwa perencanaan merupakan instrumen yang akan membantu kita untuk mencapai tujuan. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh seorang perencana adalah bahwa tujuan-tujuan mereka kurang dapat dirumuskan secara tepat. Sering kali tujuan-tujuan tersebut didefinisikan secara kurang tegas, karena kadang kala tujuan-tujuan

tersebut ditetapkan oleh pihak lain. Perencanaan program kerja dan kegiatan menjadi satu kesatuan dengan perencanaan anggaran, sehingga program kerja dan kegiatan direncanakan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Perencanaan yang baik meliputi penyusunan kegiatan dan anggaran yang detail, tidak adanya anggaran yang diblokir serta tidak adanya tambahan anggaran sangat menentukan penarikan dana tepat waktu [5].

Dengan melakukan perencanaan anggaran yang optimal, pemerintah daerah dapat memprediksi akan digunakan untuk apa suatu anggaran ke depannya. Suatu anggaran telah direncanakan dari mana sumber pendapatannya sejak awal dan nantinya akan digunakan untuk apa sehingga anggaran dapat digunakan sebagai pedoman kerja. Dengan demikian, anggaran tersebut dapat menjadi patokan dalam merealisasikan program atau kegiatan pemerintah daerah dan akan meminimalisir penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun.

Sudarwati, Karamoy, dan Pontoh [2] menemukan bahwa perencanaan yang kurang baik dengan tidak menyusun skala prioritas perencanaan kegiatan akan menyebabkan penumpukan penyerapan anggaran. Apabila telah dilakukan perencanaan anggaran dengan baik seharusnya sudah dapat menjamin anggaran tersebut dapat terserap secara optimal dan proposional selama rentang waktu satu periode anggaran. Penyerapan anggaran yang terkonsentrasi pada suatu waktu saja menunjukkan perencanaan anggaran yang tidak optimal. Perencanaan anggaran yang matang dan baik akan meminimalisir terjadinya penumpukan penyerapan anggaran karena dalam perencanaan anggaran yang baik ditentukan juga waktu kapan suatu pos anggaran tertentu harus dicairkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Nugroho [9] yang menemukan bahwa faktor perencanaan mempengaruhi terjadinya penumpukan penyerapan anggaran.

#### **2.4 Pelaksanaan Anggaran dan Penumpukan Penyerapan Anggaran**

Pelaksanaan adalah suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan untuk merealisasikan seluruh rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya [1]. Pelaksanaan anggaran adalah tahap yang sangat penting dalam perealisasi program

dan kegiatan pemerintah yang telah disusun/dibuat [2].

Walaupun perencanaan anggaran telah dilakukan sebaik mungkin, belum menjamin bahwa pelaksanaan anggarannya pun akan baik juga. Pelaksanaan anggaran yang konsisten sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya dan pelaksanaan anggaran yang betul-betul berpedoman pada perencanaan anggaran akan meminimalisir terjadinya penumpukan penyerapan anggaran. Pelaksanaan anggaran yang teratur dan tidak menunda pekerjaan akan menghindari terjadinya hal tersebut. Ini berarti bahwa pelaksanaan anggaran yang baik akan menghasilkan penyerapan anggaran yang baik pula. Sebaliknya, pelaksanaan anggaran yang buruk akan menghasilkan penyerapan anggaran yang buruk pula. Sebagaimana ditemukan oleh Malahayati, Islahuddin, dan Basri [6] bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap tingkat penyerapan anggaran pada suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam pelaksanaan anggaran kerap kali terjadi kendala-kendala yang mengakibatkan suatu program/kegiatan tidak dapat dilakukan sesuai jadwal atau rencana awal sehingga mempengaruhi realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Ini menyebabkan pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai oleh anggaran akan mundur waktu pelaksanaannya dan otomatis akan memundurkan waktu penyerapan anggaran. Jauhari [17] menemukan bahwa lambatnya pelaksanaan anggaran menjadi penyebab terjadinya penumpukan belanja di akhir tahun anggaran.

Terdapat beberapa persoalan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan anggaran yang juga dapat mempengaruhi penyerapan anggaran. Persoalan-persoalan tersebut di antaranya adalah persoalan-persoalan yang mungkin terjadi dalam internal satuan kerja seperti: terlambat ditetapkannya surat keputusan tenaga pengelola keuangan, adanya kebiasaan pengelola anggaran yang menunda pekerjaan, dan tidak adanya penghargaan maupun hukuman bagi pihak yang berhasil ataupun gagal dalam mengelola keuangan di satuan kerja (Satker) [6]. Jika persoalan ini dapat diatasi maka masalah penyerapan anggaran pun dengan sendirinya dapat diatasi.

## 2.5 Sumber Daya Manusia Pengelola Anggaran dan Penumpukan Penyerapan Anggaran

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang juga terkait erat dengan penumpukan penyerapan anggaran karena manusia merupakan aktor yang melakukan proses penganggaran. Thoha dalam Sudasri [7] menjelaskan bahwa manusia adalah aktor utama dalam sebuah organisasi yang memiliki beberapa karakteristik seperti kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman. Organisasi merupakan suatu wadah yang memiliki tujuan dan hanya manusialah yang dapat membawa organisasi untuk mencapai tujuan. Sumber daya manusia adalah sumber daya yang memiliki implikasi besar pada suatu organisasi dibandingkan sumber daya lain yang ada dalam sebuah organisasi. Jadi, dapat dikatakan bahwa SDM merupakan penggerak dari sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi. Sebagai suatu unit yang penting dalam suatu organisasi, SDM harus berkualitas, memiliki kemampuan atau kompetensi agar mereka dapat benar-benar membantu sebuah organisasi mencapai tujuannya.

Dalam hal anggaran, SDM yang ditunjuk sebagai pejabat pengelola keuangan/anggaran sangatlah penting. Akan tetapi, tidak semua pejabat pengelola keuangan yang ditunjuk paham mengenai pengelolaan keuangan. Kurang pemahannya pejabat pengelola keuangan mengenai pengelolaan keuangan ini yang terkadang menyebabkan proses penatausahaan keuangan menjadi terhambat [4]. Tidak kompetennya SDM atau kurangnya kuantitas SDM pengelola anggaran akan mempengaruhi terjadinya penumpukan penyerapan anggaran.

SDM yang kompeten mengetahui dengan baik proses perencanaan yang sesuai dan matang serta mengetahui bagaimana kondisi di lapangan sehingga dia akan melakukan perencanaan anggaran dan menyesuaikannya dengan kondisi yang terjadi di lapangan sehingga kendala-kendala dalam pelaksanaan anggaran dapat diminimalisir. Selain itu pengelola anggaran juga harus memahami dengan baik prinsip dan ketentuan mengenai pengelolaan anggaran yang baik. Kompetennya SDM pengelola anggaran akan meminimalisir terjadinya penumpukan penyerapan anggaran.

Sebagaimana ditemukan oleh Zarinah, Darwanis, dan Abdullah [8] bahwa semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka akan semakin baik pula tingkat penyerapan anggaran. Begitu pula dengan Malahayati, Islahuddin, dan Basri [6] yang menemukan bahwa SDM berpengaruh terhadap tingkat serapan anggaran suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Utomo [18] mengemukakan upaya pembinaan untuk meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kedisiplinan, profesionalitas, dan produktivitas. Upaya penataan SDM, khususnya pada sektor publik agar lebih baik lagi juga dapat dilakukan melalui perbaikan penghasilan/remunerasi [4].

## 2.6 Pengadaan Barang/Jasa dan Penumpukan Penyerapan Anggaran

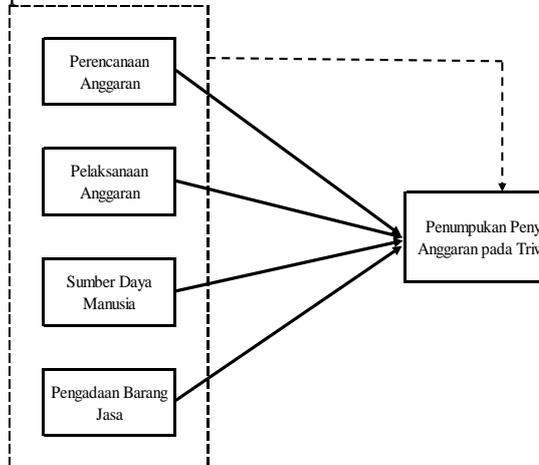
Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa [19], pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis, dan keuangan, pengadaan barang/jasa harus menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang ada menurut PP 54 tahun 2010 tersebut yaitu efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel [20].

Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh pemerintah termasuk oleh pemerintah daerah, karena pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah membutuhkan dukungan pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa ini akan mempengaruhi terjadinya penyerapan pada anggaran pemerintah. Semakin banyak pengadaan barang/jasa yang dilakukan maka otomatis penyerapan anggaran pun akan semakin banyak. Demikian pula sebaliknya, semakin sedikit pengadaan barang/jasa yang dilakukan maka otomatis penyerapan anggaran pun akan semakin sedikit. Hal ini telah dibuktikan secara empiris oleh

Sudarwati, Karamoy, dan Pontoh. [2] yang menemukan bahwa faktor pengadaan barang/jasa yang kurang baik menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penumpukan realisasi anggaran. Demikian juga dengan Nugroho dan Alfarisi [5] yang menemukan bahwa faktor pengadaan barang/jasa pemerintah mempengaruhi besaran realisasi penyerapan anggaran.

Pengadaan barang/jasa melibatkan pihak lain di luar instansi pemerintahan yaitu pihak ketiga sehingga kemungkinan terjadinya permasalahan pun tidak dapat dihindari. Permasalahan dalam proses pengadaan barang/ jasa ini akan mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran. Dengan melakukan perbaikan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat meminimalisir terjadinya kendala kendala tersebut sehingga dampaknya terhadap penumpukan penyerapan anggaran pun dapat dihindari.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah diuraikan di atas, dapat digambarkan hubungan antar variabel atau model penelitian berikut ini.



Gambar 1. Hubungan antar Variabel/Model Penelitian

Keterangan :

————— : Pengaruh secara Parsial  
 - - - - - : Pengaruh secara Simultan

### 2.3 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian yang dikembangkan berdasarkan kajian pustaka di atas adalah sebagai berikut:

- H1: Faktor perencanaan anggaran berpengaruh negatif terhadap penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV di Kota Cimahi.
- H2: Faktor pelaksanaan anggaran berpengaruh negatif terhadap penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV di Kota Cimahi.
- H3: Faktor sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV di Kota Cimahi.
- H4: Faktor pengadaan barang/jasa berpengaruh negatif terhadap penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV di Kota Cimahi.
- H5: Faktor perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, sumber daya manusia, dan pengadaan barang/jasa berpengaruh negatif secara simultan terhadap penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV di Kota Cimahi.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan metodenya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah perencanaan anggaran (X1), pelaksanaan anggaran (X2), sumber daya manusia (X3), dan pengadaan barang/jasa (X4). Sedangkan variabel dependennya adalah penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV (Y). Penelitian kuantitatif melakukan analisis dengan menggunakan alat bantu statistik.

### 3.2 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel penelitian ini disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Rujukan	Item
Perencanaan Anggaran(X1)	Partisipasi semua elemen	Heriyanto dalam Jauhari (2017)	1
	Akurasi Data		2,3
	Proses perencanaan anggaran perencanaan dan kebutuhan		4,5,6,7,8
	revisi dan perubahan		9
	Waktu Perencanaan		10
Pelaksanaan Anggaran (X2)	efektifitas	Teori pelaksanaan anggaran	11
	Kebijakan		1,2
	Kemampuan Internal Pengguna Anggaran		3,4
	Komitmen		5,6,7,8
	Tingkat Kesiapan melaksanakan program/kegiatan		9,10
Sumber Daya Manusia (X3)	Kuantitas SDM	Campbell dalam	11
	Knowledge (pengetahuan yang dimiliki)		1,2,3,4

	pegawai)
	Skill (keterampilan yang dimiliki pegawai)
	Motivation (dorongan dan semangat untuk melakukan pekerjaan)
	Attitude (Sikap)
Pengadaan Barang dan jasa (X4)	efisien
	efektif
	transparan
	terbuka
	bersaing
	adil/tidak diskriminatif
	akuntabel
Penumpukan Pencairan Anggaran di Triwulan IV (Y)	Tidak Tepat Waktu
	Penyerapan anggaran dalam persentasi rendah di awal periode (triwulan I,II dan III)
	Penyerapan anggaran dalam presentasi yang tinggi pada triwulan IV

sebanyak 25 organisasi perangkat daerah (OPD) mengembalikan 3 kuesioner secara lengkap. Satu OPD hanya mengembalikan 2 kuesioner, dan satu OPD hanya mengembalikan 1 kuesioner. Dengan demikian jumlah kuesioner yang dikembalikan adalah 78 kuesioner yang berasal dari 27 perangkat daerah.

#### 4.2 Statistik Deskriptif

Tabel 3 Statistik Deskriptif Variabel

Feori	Descriptive Statistics			
	N	Item	Mean Total	Mean Item
Y	27	6	18.11	3,02
X1	27	11	35.89	3,26
X2	27	11	34.48	3,13
X3	27	10	33.22	3,32
X4	27	12	36.33	3,03
Valid N (listwise)	27			

### 3.3 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah 28 Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Cimahi. Adapun sampel yang diambil dengan teknik sampling jenuh adalah semua anggota populasi tersebut. Namun satu perangkat daerah tidak bersedia menjadi sampel sehingga jumlah sampel menjadi 27.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data subjek yang diperoleh dari responden, sedangkan sumber datanya adalah sumber data primer.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner yang dibagikan kepada 3 responden pengelola anggaran pada masing-masing perangkat daerah yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK), dan Bendahara Pengeluaran. Dengan demikian kuesioner yang dibagikan berjumlah 81. Kuesioner menggunakan pertanyaan tertutup dengan pilihan jawaban menggunakan Skala Likert dengan nilai terendah 1 dan nilai tertinggi 5.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis regresi berganda. Alat bantu analisis menggunakan software IBM SPSS for Windows versi 23.0. Tahapan analisis data adalah analisis statistik deskriptif, pengujian terhadap instrumen dengan uji validitas dan reliabilitas, pengujian asumsi klasik (normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas), pengujian hipotesis dengan Uji t dan Uji F, dan terakhir adalah perhitungan koefisien determinasi.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Pengembalian Kuesioner

Dari 81 kuesioner yang dibagikan,

Tabel di atas menunjukkan nilai *mean* atau rata-rata variabel. Variabel Y terdiri atas 6 item sehingga nilai sebesar 18,11 menghasilkan nilai rata-rata item sebesar 3,02. Selanjutnya variabel X1 terdiri atas 11 item sehingga nilai rata-rata variabel sebesar 35,89 menghasilkan nilai rata-rata item sebesar 3,26. Variabel X2 juga terdiri atas 11 item sehingga nilai rata-rata variabel sebesar 34,48 menghasilkan nilai rata-rata item sebesar 3,13. Variabel X3 terdiri atas 10 item sehingga nilai rata-rata variabel sebesar 33,22 menghasilkan nilai rata-rata item sebesar 3,32. Terakhir, variabel X4 terdiri atas 12 item sehingga nilai rata-rata variabel sebesar 36,33 menghasilkan nilai rata-rata item sebesar 3,03. Jadi, dapat dikatakan bahwa dengan skala 1-5, semua perangkat daerah belum maksimal dalam semua faktor yang terkait dengan anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, SDM, pengadaan barang/jasa, maupun penyerapan anggarannya. Nilai terendah adalah pada variabel Y yaitu penumpukan penyerapan anggaran sedangkan nilai tertinggi adalah pada variabel X3 yaitu SDM.

### 4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

Dari hasil uji validitas yang dilakukan dengan cara membandingkan *r* hitung dan *r* tabel, seluruh item pernyataan pada seluruh variabel sudah valid karena signifikansi seluruh item lebih kecil dari tingkat kesalahan atau  $\alpha$  sebesar 0,05. Sedangkan hasil uji reabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel adalah reliabel karena nilai koefisien Cronbach Alpha lebih besar dari batas yang ditentukan sebesar 0,70, seperti

ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Uji Reliabilitas Variabel X dan Y

Variabel	Cronbach Alpha	Batas Reabilitas	K <sub>r</sub>
Perencanaan (X <sub>1</sub> )	0,772	0,70	
Pelaksanaan (X <sub>2</sub> )	0,829	0,70	
Sumber Daya Manusia (X <sub>3</sub> )	0,844	0,70	
Pengadaan Barang Jasa (X <sub>4</sub> )	0,813	0,70	
Penumpukan Penyerapan Anggaran pada Triwulan IV (Y)	0,772	0,70	

	Tolerance	VIF
X1	0,969	1,032
X2	0,904	1,106
X3	0,960	1,033
X4	0,878	1,139

Pada Tabel 6 terlihat angka *tolerance* dari seluruh variabel X lebih dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) seluruhnya kurang dari 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas di antara seluruh variabel independennya.

#### 4.4 Uji Asumsi Klasik

##### 4.4.1 Uji Normalitas

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		Y	X1	X2	X3
N		27	27	27	27
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	18,11	35,89	34,48	34,48
	Std. Deviation	4,070	7,612	5,214	5,214
Most Extreme Differences	Absolute	,111	,114	,129	,129
	Positive	,111	,069	,129	,129
	Negative	-,094	-,114	-,095	-,095
Test Statistic		,111	,114	,129	,129
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>	,200 <sup>c,d</sup>	,200 <sup>c,d</sup>	,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

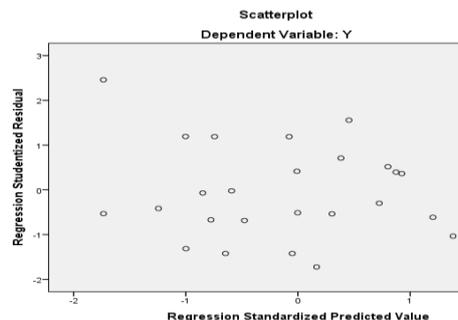
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan Tabel 5 dapat dikatakan bahwa nilai signifikansi seluruh variabel berada di atas  $\alpha$  0,05, maka data tersebut dapat disimpulkan berdistribusi normal.

##### 4.4.2 Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Grafik Scatterplots Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa tidak terdapat pola tertentu yang terbentuk dari penyebaran titik-titik karena titik-titik tersebut tersebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam data penelitian ini.

##### 4.4.3 Uji Multikolinieritas

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistic
-------	------------------------

##### 4.5 Persamaan Regresi Berganda

Hasil analisis regresi berganda disajikan pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Berganda dan Uji Parsial

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	54,526	4,798		11,365	,000
	X4	-,204	,087	-,273	-2,343	,029
	X1	-,189	,059	-,354	-3,185	,004
	X2	-,397	,090	-,508	-4,420	,000
	X3	-,257	,079	-,363	-3,271	,003

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan Tabel 7, persamaan regresi berganda yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$Y = 54,526 - 0,189X_1 - 0,397X_2 - 0,257X_3 - 0,204X_4 \quad (1)$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat diketahui nilai konstanta (a) adalah sebesar 54,526 yang berarti bahwa apabila nilai semua variabel independen sama dengan 0 maka nilai variabel dependennya bertambah sebesar 54,526. Selanjutnya, variabel independen perencanaan (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,189, lalu variabel pelaksanaan (X2) memiliki nilai koefisien sebesar -0,397, variabel sumber daya manusia (X3) memiliki nilai koefisien sebesar -0,257, dan variabel pengadaan barang/jasa (X4) memiliki nilai koefisien sebesar -0,204. Dengan demikian, keempat variabel independen memiliki nilai negatif (-) yaitu berbanding terbalik dengan nilai variabel dependen, yang berarti semakin tinggi perencanaan, pelaksanaan, SDM, dan pengadaan barang/jasa, maka semakin rendah penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV.

##### 4.6 Hasil Pengujian Hipotesis

###### 4.6.1 Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Berdasarkan Tabel 7, hasil pengujian hipotesis secara statistik menunjukkan bahwa variabel perencanaan (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,004 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan atau  $\alpha$  sebesar 0,05, maka hipotesis **H1 diterima** yang berarti perencanaan anggaran berpengaruh negatif terhadap penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV. Berikutnya, variabel pelaksanaan (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka hipotesis **H2 diterima** yang berarti pelaksanaan anggaran berpengaruh negatif terhadap penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV. Selanjutnya, variabel SDM (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,003 < 0,05$ , maka hipotesis **H3 diterima** yang berarti SDM berpengaruh negatif terhadap penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV. Terakhir, variabel pengadaan barang/jasa (X4) memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,029 < 0,05$ , maka hipotesis **H4 diterima** yang berarti pengadaan barang/jasa berpengaruh negatif terhadap penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV.

#### 4.6.2 Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis Simultan

ANOVA <sup>a</sup>					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	317,440	4	79,360	15,420
	Residual	113,226	22	5,147	
	Total	430,667	26		

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1, X4

Pada Tabel 8 terlihat nilai F sebesar 15,420 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari  $\alpha$  0,05. Dengan demikian **H5 diterima** dan dapat diinterpretasikan bahwa variabel independen yang terdiri atas perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, SDM, dan pengadaan barang/jasa berpengaruh negatif secara simultan terhadap variabel dependen yaitu penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV.

#### 4.7 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 9. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,859 <sup>a</sup>	,737	,689	

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1, X4

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan pengujian hipotesis, diperoleh

hasil variabel independen berpengaruh negatif secara simultan terhadap variabel dependennya. Selanjutnya, dari hasil koefisien determinasi pada Tabel 9 di atas terlihat nilai *Adjusted R Square* adalah 0,689 yang berarti besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 0,689 atau 68,9%. Ini berarti 68,9% penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV disebabkan oleh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, SDM, dan pengadaan barang/jasa. Sedangkan 31,1% disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### 4.8 Pembahasan

##### 4.8.1 Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penumpukan Penyerapan Anggaran pada Triwulan IV

Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh negatif terhadap penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV di Kota Cimahi. Ini berarti, semakin baik perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi maka akan semakin berkurang penumpukan penyerapan anggarannya pada Triwulan IV. Sebaliknya, semakin buruk perencanaan anggaran yang dilakukan maka akan semakin bertambah penumpukan penyerapan anggarannya pada Triwulan IV. Hasil ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Schiavo-Campo, Salvatore dan Tommasi [21] yang menyatakan bahwa anggaran dengan perencanaan yang baik dapat saja dilaksanakan secara buruk, namun anggaran yang direncanakan secara buruk tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu perencanaan harus dioptimalkan agar kondisi yang buruk seperti penumpukan penyerapan anggaran tidak terjadi. Terjadinya penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV merupakan hal yang harus dapat dihindari oleh seluruh instansi pemerintah karena memiliki dampak buruk yaitu masyarakat tidak dapat atau tertunda menikmati program yang telah disusun oleh pemerintah.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Sudarwati, Karamoy, Pontoh (2017) [2] yaitu bahwa faktor perencanaan menjadi salah satu penyebab terjadinya penumpukan realisasi anggaran belanja di akhir tahun. Hasil ini juga mengonfirmasi Nugroho dan Alfarisi (2017) [5] yang menemukan bahwa perencanaan

berpengaruh signifikan negatif terhadap melonjaknya penyerapan anggaran Kuartal IV instansi pemerintah. Demikian juga dengan Wardhani, Fadli, dan Abdillah. (2017) [22] yang menemukan bahwa perencanaan berpengaruh signifikan terhadap penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun.

Sebagaimana dijelaskan oleh Haryanto (2008:74) [13], perencanaan merupakan instrumen yang membantu kita untuk mencapai tujuan. Perencanaan yang baik meliputi penyusunan kegiatan dan anggaran yang detail, tidak adanya anggaran yang diblokir serta tidak adanya tambahan anggaran sangat menentukan penarikan dana tepat waktu (Nugroho dan Alfarisi, 2017) [5]. Hasil statistik deskriptif penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran di Kota Cimahi masih kurang baik dengan nilai rata-rata variabel ini sebesar 3,26 dari skala 1-5. Inilah yang menyebabkan terjadinya masalah penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV.

Dengan demikian, agar dapat mengurangi penumpukan penyerapannya pada Triwulan IV, pemerintah Kota Cimahi harus melakukan perencanaan anggaran secara lebih baik dengan meningkatkan indikator-indikator perencanaan anggaran yang saat ini masih belum maksimal. Di antaranya adalah dengan menyusun skala prioritas perencanaan kegiatan beserta waktu yang jelas kapan suatu pos anggaran tertentu harus dicairkan. Selain itu, perlu dipastikan juga bahwa penyusunan anggaran sudah didasarkan pada data yang lengkap dan akurat, didasarkan atas kebutuhan yang sebenarnya, serta pagu anggaran sesuai dengan harga pasar. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah sistem aplikasi yang digunakan harus siap pakai dan tidak bermasalah.

#### **4.8.2 Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Penumpukan Penyerapan Anggaran pada Triwulan IV**

Hasil pengujian secara parsial selanjutnya menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh negatif terhadap penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV, yang berarti semakin baik pelaksanaan anggaran yang dilakukan maka semakin berkurang penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV di Pemerintah Kota Cimahi, demikian juga sebaliknya.

Hasil ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran merupakan tahap yang sangat penting dalam perealisasi program dan kegiatan pemerintah (Sudarwati, Karamoy, dan Pontoh [2]). Hasil ini juga mendukung hasil penelitian Sudarwati, Karamoy, dan Pontoh (2017) [2] yang menemukan bahwa faktor pelaksanaan menjadi salah satu penyebab terjadinya penumpukan realisasi anggaran belanja di akhir tahun. Demikian juga dengan Nugroho dan Alfarisi (2017) [5] yang menemukan bahwa pelaksanaan berpengaruh negatif terhadap melonjaknya penyerapan anggaran Quartal IV instansi pemerintah, serta Wardhani, Fadli, dan Abdillah (2017) [22] yang menemukan bahwa pelaksanaan berpengaruh signifikan terhadap penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun.

Sebagaimana halnya perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran di Kota Cimahi juga masih kurang baik dan belum maksimal, yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata variabel ini sebesar 3,13 dari skala 1-5. Inilah yang juga menyebabkan terjadinya penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kota Cimahi harus meningkatkan kualitas pelaksanaan anggarannya. Jika mengacu pada indikator pelaksanaan anggaran, pemerintah Kota Cimahi masih harus meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait, kepatuhan terhadap POK (Petunjuk Operasional Kegiatan), komitmen pejabat dalam menandatangani dokumen-dokumen, penggunaan anggaran berbasis kinerja, serta kedisiplinan instansi dalam mengikuti jadwal kegiatan yang sudah disusun. Terkait masalah disiplin, mekanisme penghargaan maupun hukuman bagi pihak yang berhasil dan gagal perlu ditegakkan (Miliasih, 2012 dalam Malahayati, Islahuddin, dan Basri, 2015) [6].

#### **4.8.3 Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Penumpukan Penyerapan Anggaran pada Triwulan IV**

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV, yang berarti semakin baik kualitas SDM maka semakin berkurang penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV di Pemerintah Kota Cimahi, demikian juga sebaliknya. Hasil penelitian ini mengonfirmasi hasil penelitian

Sudarwati, Karamoy, dan Pontoh (2017) [2] yang menunjukkan bahwa faktor SDM menjadi salah satu penyebab terjadinya penumpukan realisasi anggaran belanja di akhir tahun. Berikutnya hasil penelitian Sudasri (2016) [7] yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Demikian juga dengan Wardhani, Fadli, dan Abdillah (2017) [22] yang menemukan bahwa SDM berpengaruh signifikan terhadap penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun.

Sebagaimana dijelaskan oleh Thoah (2001) dalam Sudasri [7], manusia adalah aktor utama dalam sebuah organisasi yang merupakan penggerak dari sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi. SDM harus berkualitas, memiliki kemampuan atau kompetensi agar mereka dapat benar-benar membantu sebuah organisasi mencapai tujuannya, dalam hal ini adalah penyerapan anggaran. Oleh karena itu, jika ingin meningkatkan penyerapan anggaran secara merata atau mengurangi penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV, pemerintah Kota Cimahi perlu melakukan perbaikan pada faktor SDM ini.

Nilai variabel untuk faktor ini berdasarkan hasil statistik deskriptif adalah 3,32 dari skala 1-5, yang berarti belum maksimal. Berdasarkan indikator-indikator variabel, perbaikan dapat dilakukan dengan mengurangi perangkapan jabatan/tugas, pemberian sanksi bagi pengelola anggaran yang tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, meningkatkan pemahaman mengenai aturan pengelolaan keuangan, serta mutasi yang mempertimbangkan beban tugas pada bagian terkait. Ini juga sejalan dengan Utomo (2011) [18] yang mengemukakan bahwa upaya pembinaan untuk meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kedisiplinan, profesionalitas, dan produktivitas. Sudarwati, Karamoy, dan Pontoh, 2017 [4] menambahkan bahwa upaya penataan SDM, khususnya pada sektor publik agar lebih baik lagi juga dapat dilakukan melalui perbaikan penghasilan/remunerasi.

#### **4.8.4 Pengaruh Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penumpukan Penyerapan Anggaran pada Triwulan IV (Y)**

Hasil pengujian parsial terakhir menunjukkan bahwa pengadaan barang/jasa

berpengaruh negatif terhadap penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV, yang berarti bahwa semakin baik pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Cimahi maka semakin berkurang penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV, demikian juga sebaliknya. Hasil ini sejalan dengan Sudarwati, Karamoy, dan Pontoh (2017) [2] yang menemukan bahwa faktor pengadaan barang/jasa menjadi salah satu penyebab terjadinya penumpukan realisasi anggaran belanja di akhir tahun. Demikian juga dengan Theana (2018) [23] yang menemukan bahwa pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja.

Nilai rata-rata variabel ini adalah 3,03 yang menunjukkan masih belum maksimal. Dengan demikian, agar penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV dapat dikurangi maka perlu dilakukan perbaikan pada proses pengadaan barang/jasa ini. Perbaikan dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa menurut PP 54 tahun 2010 yaitu efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel (Nurachmad, 2011:4) [20]. Terkait dengan pemerintah Kota Cimahi yang diteliti, perbaikan secara khusus perlu dilakukan terhadap indikator-indikator variabel ini yaitu perbaikan proses dan mekanisme tender/lelang, penetapan pemenang lelang, pencatatan kegiatan lelang, jadwal pelaksanaan pekerjaan oleh pemenang lelang yang realistis, serta perlakuan yang sama dan tidak memihak kepada semua calon penyediaan barang/jasa atau peserta lelang.

#### **4.8.5 Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Pengadaan Barang/Jasa (X4) terhadap Penumpukan Penyerapan Anggaran pada Triwulan IV**

Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, sumber daya manusia, dan pengadaan barang/jasa berpengaruh negatif secara simultan terhadap penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV. Ini berarti bahwa semakin baik perencanaan, pelaksanaan, SDM, dan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi maka semakin berkurang penumpukan penyerapan anggaran pada

Triwulan IV. Adapun besarnya pengaruh yaitu 68,9% secara umum diinterpretasikan sebagai cukup besar. Dengan demikian, jika ingin mengurangi penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV, maka pemerintah Kota Cimahi harus memperhatikan dan meningkatkan kualitas keempat faktor ini dengan meningkatkan masing-masing indikatornya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengonfirmasi kembali hasil penelitian Nugroho dan Alfarisi (2017) [5] yang menunjukkan bahwa faktor perencanaan, faktor pelaksanaan anggaran, faktor sumber daya manusia, faktor pengadaan barang dan jasa serta faktor permasalahan kebijakan, kinerja, dan permasalahan koordinasi dengan instansi lain secara simultan berpengaruh terhadap melonjaknya penyerapan anggaran Quartal IV instansi pemerintah. Demikian juga dengan Sudasri (2016) [7] yang menunjukkan bahwa Perencanaan Anggaran dan Kompetensi SDM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Selanjutnya juga dengan Malahayati, Islahuddin, dan Basri (2017) [6] yang menyimpulkan bahwa kapasitas SDM, perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran berpengaruh secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

## 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor perencanaan anggaran berpengaruh negatif terhadap penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV di Kota Cimahi.
2. Faktor pelaksanaan anggaran berpengaruh negatif terhadap penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV di Kota Cimahi.
3. Faktor sumber daya manusia (SDM) berpengaruh negatif terhadap penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV di Kota Cimahi.
4. Faktor pengadaan barang/jasa berpengaruh negatif terhadap penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV di Kota Cimahi.
5. Faktor perencanaan, pelaksanaan, SDM, pengadaan barang/jasa berpengaruh negatif secara simultan terhadap

penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV di Kota Cimahi.

### 5.2 Saran

Berikut merupakan saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait yaitu:

1. Bagi Pemerintah Kota Cimahi
  - a. Disarankan untuk menyusun skala prioritas perencanaan kegiatan beserta waktu yang jelas kapan suatu pos anggaran tertentu harus dicairkan, memastikan bahwa penyusunan anggaran sudah didasarkan pada data yang lengkap dan akurat, didasarkan atas kebutuhan yang sebenarnya, serta pagu anggaran sesuai dengan harga pasar, serta sistem aplikasi yang digunakan harus siap pakai dan tidak bermasalah.
  - b. Disarankan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait, kepatuhan terhadap POK (Petunjuk Operasional Kegiatan), komitmen pejabat dalam menandatangani dokumen-dokumen, penggunaan anggaran berbasis kinerja, serta kedisiplinan instansi dalam mengikuti jadwal kegiatan yang sudah disusun.
  - c. Disarankan untuk mengurangi perangkapan jabatan/tugas, memberikan sanksi bagi pengelola anggaran yang tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, meningkatkan pemahaman mengenai aturan pengelolaan keuangan, mutasi yang mempertimbangkan beban tugas pada bagian terkait, serta perbaikan penghasilan/remunerasi.
  - d. Disarankan untuk melakukan perbaikan proses dan mekanisme tender/lelang, penetapan pemenang lelang, pencatatan kegiatan lelang, jadwal pelaksanaan pekerjaan oleh pemenang lelang yang realistis, serta perlakuan yang sama dan tidak memihak kepada semua calon penyedia barang/jasa atau peserta lelang.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya  
Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian di tempat yang sama atau tempat lain dengan tambahan atau perubahan variabel independen sehingga dapat diketahui faktor lain yang mempengaruhi penumpukan penyerapan anggaran pada triwulan IV, yang belum digunakan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. P. K. Pemerintah, Paris Riview: Misteri Penyerapan Anggaran, Yogyakarta: BPKP, 2011.
- [2] N. Sudarwati, H. Karamoy and W. Pontoh, "Identifikasi Faktor-Faktor Penumpukan Realisasi Anggaran Belanja di Akhir Tahun," *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*, pp. 129-138, 2017.
- [3] T. Sanjaya, "Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran pada OPD Provinsi Sumatera Barat," *Fakultas Ekonomi*, pp. 1-13, 2018.
- [4] P. K. Negara, L. Handajani and L. Effendy, "Studi Kasus Fenomena Tingkat Serapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah," *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, vol. 19, pp. 76-91, 2018.
- [5] R. Nugroho and S. Alfari, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Melonjaknya Penyerapan Anggaran Quartal IV Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan)," *Jurnal BPPK*, vol. 10, pp. 22-37, 2017.
- [6] C. Malahayati, Islahuddin and H. Basri, "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh," *Jurnal Magister Akuntansi*, vol. 4, pp. 11-19, 2017.
- [7] D. Sudasri, "Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran," *Fakultas Ekonomi*, pp. 1-22, 2016.
- [8] M. Zarinah, Darwanis and S. Abdullah, "Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Utara," *Jurnal Magister Akuntansi*, vol. 1, pp. 90-97, 2016.
- [9] M. A. Nugroho, "Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penumpukan Pencairan Dana APBN di Akhir Tahun (Studi Kasus di KPPN Malang)," *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, pp. 1-19, 2013.
- [10] H. Heriyanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementrian/Lembaga di Wilayah Pembayaran Jakarta," *Tesis Universitas Indonesia*, 2012.
- [11] S. Salamah, "Strategi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah," *Economics Development Analysis Journal*, vol. 1, no. 1, pp. 45-52, 2018.
- [12] M. Zakiati, "Analisis Serapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Pemerintah Kota Sabang," *Jurnal Akuntansi*, vol. 5, pp. 67-76, 2016.
- [13] A. A. A. Krisnawati, P. I. Sudana and D. G. Wirana, "Sebaran Waktu Realisasi Anggaran Belanja Modal: Studi Fenomenologi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar," *E-Journal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, vol. 6.8, 2017.
- [14] Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2009.
- [15] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, "Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional".
- [16] Haryanto, Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Pendekatan Kinerja, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008.
- [17] Jauhari, "Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I dan KPPN Bandung II," *Tesis Universitas Pasundan*, 2017.
- [18] J. U. Suwardi, "Pengaruh Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Pegawai Setda Kabupaten Pati)," *Jurnal Analisis Manajemen*, vol. Volume 5, pp. 75-86, 2011.
- [19] Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, "Pengadaan Barang/Jasa".
- [20] M. Nurachmad, Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 & Peraturan Perundang-Undangan Terkait, Jakarta : Visimedia, 2011.
- [21] Schiavo-Campo, Managing Government Expenditure, The University of California : Asian Development Bank, 2008.
- [22] A. Wardhani, Fadli and W. Abdillah, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran di Akhir Tahun," *Fakultas Ekonomi*, 2017.
- [23] H. Theana, Pengaruh Perencanaan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja, POLBAN: Tugas Akhir. Tidak diterbitkan, 2018.

- [24] I. Bastian, Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar, Jakarta: Erlangga, 2010.